**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR AGAM**

Oleh :Yulisa Fitri

PembimbingI : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

PembimbingII : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Alamat:Jalan Kali Putih No 4, Pekanbaru-Riau

Email : fitriyulisha22@gmail.com

ABSTRACT

Until now, criminal acts committed by children still occur in the jurisdiction of Agam Police Force. In accordance with Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children the process of settlement of child criminal cases that is through diversi. Criminal acts committed by children in the territory of Agam Police Force in 2015 as many as 5 cases, in 2016 as many as 5 cases, and in 2017 the number of crimes committed by children as many as 6 cases. From the above cases, 4 cases have been successfully diverted, 7 cases failed to be resolved by diversion while 5 cases were not attempted to be diverted.

This research is a type of research that is empirical or sociological law research. Legal juridical empirical research or sociological law research is research conducted directly on site or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem under study. Viewed from its nature describes the facts of symptoms and facts contained in life in a deep social.

The results of research conducted by the author is the first implementation of the diversion in the process of criminal justice of children handled by the Police Resort Agam not optimal. Second, constraints from the lack of knowledge and legal awareness of the community, at least the number of members of the Women and Child Protection unit and not yet holds a law degree. Third, efforts to overcome these obstacles by increasing participation and knowledge with legal socialization to the community, increasing the number of members of the Protection of Women and Children unit and should have a police degree holds law degree.

Keywords: Investigation - Child Crime - Diversi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.¹

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.² Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dilakukan upaya diversifikasi dan *restorative justice* yang pada dasarnya diwajibkan untuk diupayakan oleh penegak hukum dalam tingkat pemeriksaan.

Restorative justice adalah proses di mana para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran khusus secara kolektif menyelesaikan

bagaimana menghadapi tindak pidana dan implikasinya untuk masa depan.³ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan diluar pidana.⁴

Dalam suatu sistem peradilan pidana, polisi adalah awal dari proses tersebut. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara dalam penyidikan.

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan dimulai, ketentuan ini sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 98 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur ketentuan pidana untuk para penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversifikasi, yang berbunyi:

“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

³ Katherine Doolin, 2007, "Seeking definitional clarity in restorative justice", *Jurnal of criminal law*, Vathek Publishing, chapter LXXI, series 5

⁴*Op.cit* Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 8.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan laporan kepolisian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat banyaknya penyidik yang tidak mengupayakan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak, diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan, dan penganiayaan berencana. Dapat dikatakan bahwa penerapan kasus diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Agama belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agama”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agama ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik di pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agama?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agama.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyidik di pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak kepolisian terhadap masalah pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk

memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵

- a. *Total enforcement*
- b. *Full enforcement*
- c. *Actual enforcement,*

b. Konsep Restorative Justice

Konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep pemikiran yang terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan masyarakat yang merasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat ini.⁶

Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat. Tujuan mediasi adalah untuk memanusiakan sistem

peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh korban, pelaku dan masyarakat.⁷ Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

c. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

⁵*Ibid.* hlm. 39.

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 108.

⁷ Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Vol, XII, No, 3 September 2012, hlm. 407.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Perlindungan anak sebenarnya tidak ada batas, sebab anak merupakan amanah dari sang pencipta kepada orang tuanya.⁸

Tujuan dasar perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan social, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan

untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana.¹¹
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah penjatuhan pidana.¹²
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹³

¹⁰<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 12 Februari 2018.

¹¹*Op.cit* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²*Op.cit* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³*Ibid.*

⁸Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 13.

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

5. Wilayah adalah atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu Negara.¹⁴
6. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia¹⁵ yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, terdapat sanksi jika peraturan tersebut dilanggar.
7. Kepolisian Resor Agam adalah kepolisian di lingkungan Kabupaten Agam yang berkedudukan di Lubuk Basung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum nyata dan bagaimana efektifitas hukum di lingkungan masyarakat.¹⁶ Penelitian ini objeknya yaitu fenomena hukum¹⁷ dan penelitian ini dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang

¹⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 203.

¹⁵ R. Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.153.

¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 5.

masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini maka diharapkan akan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya atau dengan kata lain, antara *law in book* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das seollen* dan *das sein*.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penyelesaian penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kabupaten Agam. Alasannya yaitu di Kabupaten Agam banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun diduga pepelaksanaan diversinya tidak berjalan secara optimal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis terkhususnya di Kepolisian Resor Kabupaten Agam.

b. Sampel

Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian penulis, yaitu :

- 1) Kepala Unit Satuan Perlindungan

- Perempuan dan Anak
Kepolisian Resor Agama
- 2) Penyidik Pembantu
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Kepolisian Resor Agama
- 3) Pelaku Tindak Pidana
Anak

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok-pokok penelitian¹⁸ dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala

¹⁸Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 47

Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak, Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Kajian Kepustakaan

Metode yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan berkaitan dengan penulis.

6. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dan hasil analisis berpedoman cara berfikir induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Agam

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Agam merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang terletak antara $00^{\circ}01'34''$ – $00^{\circ}28'43''$ Lintang Selatan dan $99^{\circ}46'39''$ – $100^{\circ}32'50''$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Agam adalah $\pm 2.232,30 \text{ Km}^2$ atau hanya sekitar 5,29% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat ($42.229,04 \text{ Km}^2$) dengan Ketinggian 0 – 2891 Mdpl.

Kondisi Wilayah Kabupaten Agam merupakan daerah perbukitan bukit barisan dan pergunungan serta sebagiannya lagi merupakan daerah pesisir serta kawasan lindung. Dengan Kondisi wilayah tersebut, maka kabupaten Agam terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan hutan Lindung yang merupakan daerah rawan bencana dengan potensi gempa bumi, longsor, tanah labil, letusan gunung dan bahaya banjir.

2. Administratif

Luas Kabupaten Agam adalah $2.232,30 \text{ KM}^2$ atau 5,29% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Batas – batas

Wilayah Kabupaten Agam sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudra Indonesia

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten Agam tahun 2017 adalah sebesar 455.484 jiwa, dimana dalam kurun waktu lima tahun penduduk kabupaten Agam bertambah sebesar 15.873 jiwa. Penduduk Agam tersebar di 16 Kecamatan, dimana konsentrasi penduduk terbesar berada di kecamatan Lubuk Basung sebagai pusat pemerintahan. Kemudian diikuti Ampek Angkek, Banuhampu, dan Tilatang Kamang sebagai daerah peri-urban yang merupakan pengaruh dari Pusat Kegiatan Kota Bukittinggi, sedangkan kecamatan Tanjung Raya sebagai daerah pengembangan pariwisata.

Dependensi rasio Kabupaten Agam adalah 71 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 71

orang penduduk usia yang tidak produktif. Jika dilihat menurut gender, angka dependensi ratio pada penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan dependensi rasio pada penduduk laki-laki. Dependensi ratio penduduk perempuan adalah 73 dimana setiap 100 penduduk perempuan usia produktif menanggung 73 orang penduduk perempuan yang tidak produktif. Dependensi ratio penduduk laki-laki adalah 68 yang berarti setiap 100 penduduk laki-laki usia produktif menanggung 68 orang penduduk laki-laki yang tidak produktif.

B. Gambaran Umum tentang Kepolisian Resor Agam

Kepolisian Resor Agam adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Agam. Kepolisian Resor merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Kepolisian Resor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Kepolisian Resor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Kepolisian Resor Agama adalah Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum dan keamanan yang mantap di wilayah Sumatera Barat serta terjalinnya kerjasama berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah”, melalui pendekatan “Tungku Tigo Sajarangan”.

Misi Kepolisian Resor Agama adalah :

1. Proporsional, Transparan dan Akuntabel, menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama untuk menciptakan rasa aman;
3. Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen);
4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, cepat, tanggap, responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk fisik dan psikis;
5. Mengelola secara profesional sumber daya, serta meningkatkan upaya konsolidasi Kepolisian Resor Agama untuk mewujudkan keamanan Sumatera Barat sehingga dapat mendorong

meningkatkan gairah kerja mencapai kesejahteraan anggota;

6. Memelihara Kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang diwilayah hukum Kepolisian Resor Agama;
7. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
8. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Agama;
9. Meningkatkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agama

Berdasarkan teori penegakan hukum yang artinya tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penyidik sebagai aparat penegakan hukum wajib berusaha mewujudkan ide-ide

dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Agam menyatakan bahwa setiap kasus anak yang dilaporkan ke Polres Agam tidak semua dilimpahkan ke kejaksaan, diantaranya yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan kasus pencabulan biasa.

Namun dari hasil penetapan diversi tetap saja jumlah diversi yang gagal lebih banyak dibanding jumlah diversi yang berhasil. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kecenderungan polisi melakukan penahanan terhadap anak.

Diversi tidak berhasil pada tingkat penyidikan biasanya dipicu oleh faktor orangtua anak korban yang masih belum bisa menerima dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dapat juga dari pihak korban terkadang meminta ganti rugi materi kepada pihak pelaku, tetapi dari pihak pelaku tidak mampu memberikan dan memenuhi apa yang menjadi kemauan dari pihak korban, sehingga proses diversi tidak mencapai kesepakatan.

Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar anak menjalani kehidupan nantinya tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Pasal 98 UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana untuk para penyidik yang

tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversi, yang berbunyi:

“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Jumlah data diversi yang sudah keluar penetapannya dari Kepolisian Resor Agam sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat bahwa diversi yang tidak diupayakan lebih banyak daripada diversi yang berhasil. Terbukti dengan jumlah 4 kasus diversi berhasil dan 5 kasus tidak diupayakan diversi sebagai cara alternatif pengadilan anak.

Dari lima kasus yang tidak diupayakan ada tiga kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pasal 363 KUHP dan dua kasus penganiayaan dengan rencana yaitu pasal 353 KUHP. Menurut Kanit PPA Kepolisian Resor Agam alasan penyidik tidak mengupayakan diversi pada kasus tersebut adalah berdasarkan pengalaman pada tahun 2014 dan 2015 banyaknya terjadi pengulangan tindak pidana tersebut oleh anak meskipun telah dilaksanakan diversi.

Dapat dikatakan kewenangan melakukan diversi belum dipergunakan secara maksimal untuk menangani perkara anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Agam. Padahal

kepolisian adalah instansi yang seharusnya berperan paling penting untuk mengalihkan kasus perkara anak dari sistem peradilan formal. Oleh karena itu, tujuan dari diversifikasi yaitu sebagai upaya perlindungan bagi anak untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan menghindarkan anak dari pandangan jahat di masyarakat tidak berhasil.

B. Kendala yang Dihadapi Penyidik di Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agam

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, ada beberapa faktor kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Polres Agam, yaitu:

1. Faktor Kesadaran Hukum

Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama korban atau keluarga korban akan pentingnya ditegakkan perlindungan dan kesejahteraan anak, membuat mereka tidak mau melakukan upaya diversifikasi dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, sehingga membuat penyidik kesulitan dan proses perkara tersebut dilanjutkan pada proses peradilan anak. Selain ketidakinginan pihak korban, hal yang menyulitkan penyidik dalam

pelaksanaan diversifikasi diwilayah hukum Polres Agam yaitu adanya penuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi oleh pihak korban terhadap anak sebagai pelaku.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kurang aktifnya penyidik sebagai aparat penegak hukum yang paling berperan penting dalam mengupayakan diversifikasi sebagai jalan alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, selain kurangnya anggota penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Agam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Agam hanya memiliki empat orang anggota, dan juga tidak semua anggota paham tentang peradilan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan oleh penyidik unit PPA di Kepolisian Resor Agam tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibuktikan dengan adanya kasus yang tidak diselesaikan melalui diversifikasi, seperti kasus pencurian dengan pemberatan

dan penganiayaan dengan rencana. Padahal program diversi secara internasional telah diakui dan dianggap sebagai alternatif atau cara terbaik penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum demi penanganan terbaik bagi anak.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, kendala yang di hadapi oleh penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Agam dalam mengupayakan penerapan diversi yaitu dikarenakan pihak keluarga korban tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan permintaan ganti rugi materi yang tinggi kepada pihak pelaku. Kendala lain yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan sedikitnya aparat penegak hukum khususnya di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ada di Kepolisian Resor Agam.

B. Saran

1. Perlunya pelaksanaan pelatihan yang menyeluruh bagi aparat penegak hukum terutama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak agar memperjelas pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian alternatif perkara tindak

pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Diharapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semua aparat penegak hukum yang menangani perkara anak agar berperan aktif dalam pelaksanaan diversi demi terwujudnya perlindungan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Jamil, R. Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Antje Wiener and UwePuetter, 2009 “The Quality of Norms Is What Actors Make of It: Critical Constructivist Research of Norms”, *Journal of International Law and International Relations*, Vol V, Issue 1 February.

Katherine Doolin, 2007, “Seeking definitional clarity in restorative justice”, *Jurnal of criminal law*, Vathek Publishing, chapter LXXI, series 5.

Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan Pidana*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Vol, XII, No, 3 September 2012, hlm. 407.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

D. Website

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 12 Februari 2018.